



**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II**



djp

**LAPORAN KINERJA
TAHUN 2024**

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MADIUN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penerimaan pajak merupakan komponen utama pendapatan negara karena memiliki peran sentral dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan negara. Seiring dengan dinamika perkembangan dunia yang terus berlangsung, negara dihadapkan pada beragam tantangan yang semakin kompleks dari tahun ke tahun. Tantangan tersebut perlu senantiasa direspons dengan baik demi keberlangsungan negara, oleh karena itu, negara membutuhkan pemasukan yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini tergambar dari target penerimaan pajak yang terus mengalami peningkatan sebagai respons negara terhadap kebutuhan pembiayaan yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Selama tiga tahun berturut-turut, KPP Pratama Madiun berhasil mencapai target penerimaan pajak yang telah diamanahkan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras dan dedikasi tinggi seluruh jajaran pegawai, yang secara konsisten berkontribusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pajak. Di sisi lain, kontribusi positif dari Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga menjadi faktor penting yang mendukung kinerja KPP Pratama Madiun dalam mencapai pencapaian tersebut. Sebagai salah satu Unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), KPP Pratama Madiun menyusun sebuah laporan kinerja (LAKIN). Hal ini merupakan upaya untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran serta untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyusunan laporan kinerja dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 mengenai Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan. Penyusunan LAKIN mengacu pada regulasi yang ditetapkan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 yang mengatur Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain berpedoman pada peraturan yang telah disebutkan di atas, penyusunan LAKIN juga mempertimbangkan Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 yang telah diresmikan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020. Selain itu, LAKIN juga mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020, dan Rencana Kerja KPP Pratama Madiun Tahun 2024. Dengan mengintegrasikan ketentuan regulasi dan arah strategis yang telah ditetapkan, penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran

yang komprehensif mengenai pencapaian kinerja KPP Pratama Madiun serta keselarasan dengan visi dan misi KPP Pratama Madiun.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah ditetapkan lebih lanjut pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-308/PJ/2024 hal Rincian Tugas dan Fungsi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, KPP Madiun mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

TUGAS:

“Melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Karbon serta melaksanakan produksi data, penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

FUNGSI:

1. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
2. penguasaan, pencarian, dan pengumpulan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP untuk dukungan pencapaian penerimaan nasional;
3. edukasi, pelayanan, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
4. pendaftaran Wajib Pajak, pendaftaran Objek Pajak, penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, pencabutan Surat Keterangan Terdaftar Objek Pajak, dan pemberian Nomor Objek Pajak;
5. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
6. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
7. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak termasuk penagihan dalam rangka pemberian bantuan penagihan pajak kepada negara mitra atau yurisdiksi mitra;
8. pendataan, pengenaan, dan pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak;
9. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
10. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak dan program pengungkapan sukarela;
11. analisis, tindak lanjut, dan pengelolaan informasi dari kegiatan pertukaran informasi perpajakan internasional;
12. penjaminan kualitas data hasil produksi data dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
13. produksi dan pemutakhiran basis data perpajakan;
14. penatausahaan, pengawasan, dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
15. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
16. pelaksanaan tugas kepatuhan internal;

17. penatausahaan penagihan pajak dan piutang pajak;
18. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
19. penerimaan dan/atau pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan;
20. pelaksanaan koordinasi atas kepatuhan, regulasi, organisasi, data dan informasi, dan teknologi informasi;
21. pelaksanaan kebijakan manajemen pengetahuan;
22. pelaksanaan kegiatan pengamatan; dan
23. pelaksanaan administrasi kantor.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun memiliki visi dan misi sebagai berikut:

VISI:

"Menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang mampu membangun harmoni dengan Wajib Pajak dalam rangka menumbuhkan kepatuhan sukarela dan peningkatan penerimaan pajak"

MISI:

1. *Menjalin sinergi dengan pemangku kepentingan guna membangun kemitraan yang kreatif dan inovatif guna peningkatan penerimaan pajak dan kepatuhan sukarela; dan*
2. *Melakukan pendekatan kultur dan kerja sama dengan pemangku kepentingan untuk membangun harmoni Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan.*

Selain itu, dalam rangka memupuk budaya organisasi dan meningkatkan kinerja pelayanan terhadap Wajib Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun memiliki slogan "621 HEBAT" yang merupakan pengejawantahan nilai-nilai lokal masyarakat Madiun yang bercorak Mataraman dengan rincian sebagai berikut:

1. *Hanjaya*
Nilai ini mencerminkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun yang siap mengemban amanah negara untuk membawa Indonesia menuju kemajuan dan kejayaan.
2. *Endah*
Nilai ini mencerminkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun yang siap dalam melayani Wajib Pajak dengan ramah, santun, sopan, estetika, dan beretika. Nilai ini juga merupakan representasi dari tugas pokok dan fungsi Seksi Pelayanan dan Fungsional Penyuluh.
3. *Besus*
Nilai ini mencerminkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun yang melaksanakan tugasnya dengan profesional dan inovatif. Nilai ini juga merupakan representasi dari tugas pokok dan fungsi Seksi Pengawasan I, II, III, IV, V, dan VI.

4. *Anteb*

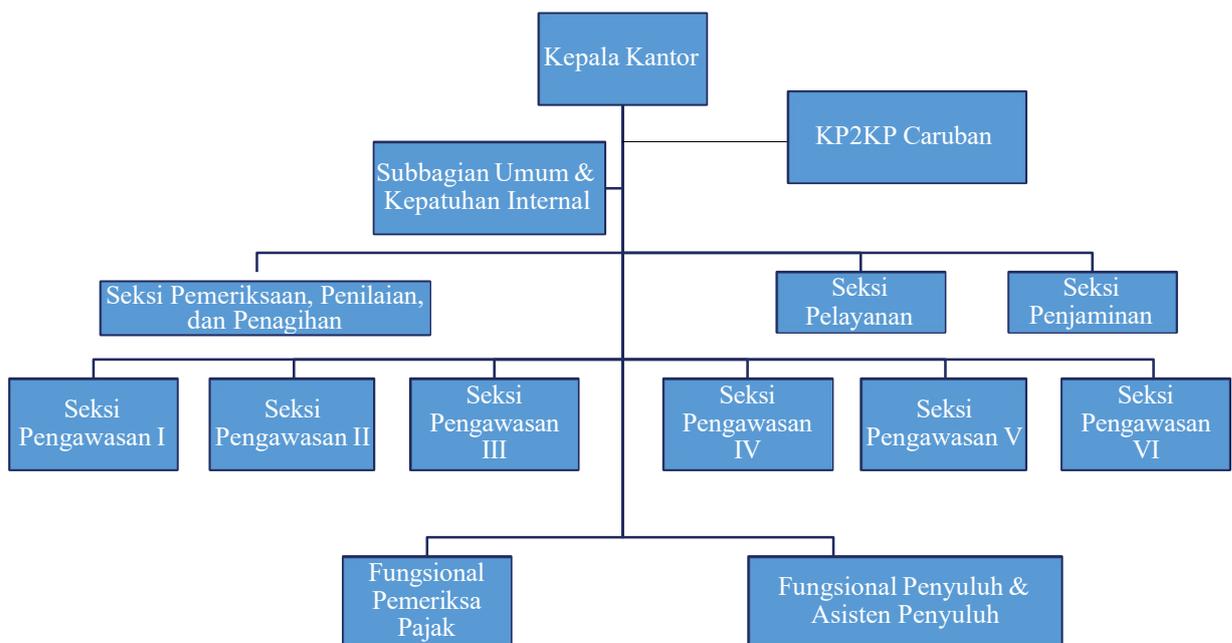
Nilai ini mencerminkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun yang melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas, kokoh dan tidak goyah oleh godaan. Nilai ini juga merupakan representasi dari tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal.

5. *Titis*

Nilai ini mencerminkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun yang melaksanakan tugasnya dengan tepat, akurat, dan pasti. Nilai ini juga merupakan representasi dari tugas pokok dan fungsi Seksi Penjaminan Kualitas Data, Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan, dan Fungsional Pemeriksa.

STRUKTUR ORGANISASI DAN KOMPOSISI PEGAWAI

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020, struktur organisasi KPP Pratama Madiun adalah sebagai berikut:



Berdasarkan data pegawai pada SIKKA per tanggal 31 Desember 2024, total pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun sebanyak 91 orang dengan komposisi pegawai berdasarkan jabatan dan usia adalah sebagai berikut:



C. SISTEMATIKA PELAPORAN

BAB I - PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- Sistematika Laporan
- Wilayah Kerja

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

- Perencanaan Strategis
- Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

- Capaian Kinerja Organisasi
- Realisasi Anggaran
- Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- Kinerja Lain-lain
- Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja 2024

BAB IV - PENUTUP

LAMPIRAN

D. WILAYAH KERJA

Wilayah kerja KPP Pratama Madiun meliputi wilayah Kota Madiun dan Kabupaten Madiun yang terdiri atas 18 wilayah kecamatan dan 225 wilayah kelurahan/desa.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dengan memperhatikan kerangka dan sasaran ekonomi makro 2020 – 2024, capaian pembangunan 2015 – 2019, dan tantangan perekonomian 2020 – 2024 maka ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020— 2024 yaitu ‘Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong’. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, dilaksanakan 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. RPJMN tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan beserta indikatornya menjadi bagian dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Dari 7 Agenda Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, masing-masing agenda dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang dicapai melalui beberapa strategi. Kementerian Keuangan mendukung seluruh Agenda Pembangunan dari 7 Agenda Pembangunan dimaksud melalui beberapa strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran pada masing-masing agenda.

Indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang terkait tisi DJP antara lain :

- a. Rasio Perpajakan terhadap PDB
- b. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*CoreTax*).

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Pada intinya, penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

Berkenaan dengan hal tersebut, ditetapkanlah suatu Indikator Kinerja Utama instansi pemerintah yang dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Indikator Kinerja Utama (IKU) KPP Pratama Madiun dan KP2KP Caruban merupakan penjabaran dari sepuluh sasaran strategis yang telah ditetapkan dan tercermin dalam Kontrak Kinerja Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 telah disusun berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020.

Adapun rincian dari Kontrak Kinerja KPP Pratama Madiun Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q1	Q2	Q3	Q4
1	Sasaran Strategis: Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal				
	Persentase realisasi penerimaan pajak	20%	45%	71%	100%
	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100
2	Sasaran Strategis: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				
	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	20%	45%	71%	100%
	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	90%	100%
3	Sasaran Strategis: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi				
	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	75%	100%
4	Sasaran Strategis: Edukasi dan pelayanan yang efektif				
	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	60%	74%
	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	5	10	15	85

5	Sasaran Strategis: Pengawasan pembayaran masa yang efektif				
	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%
6	Sasaran Strategis: Pengujian kepatuhan material yang efektif				
	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%
	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%
	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%
7	Sasaran Strategis: Penegakan hukum yang efektif				
	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%
	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	45%	75%
	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	75%	100%
8	Sasaran Strategis: Data dan informasi yang berkualitas				
	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	20%	50%	80%	100%
	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	40%	55%
9	Sasaran Strategis: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif				
	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100%	100%	100%	100%
	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	85
	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	70	90
10	Sasaran Strategis: Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel				
	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100

Sedangkan rincian dari Kontrak Kinerja KP2KP Caruban Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Target			
		Q1	Q2	Q3	Q4
1	Sasaran Strategis: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				
	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	90%	100%
2	Sasaran Strategis: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi				
	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	60%	74%
	Persentase penyelesaian permohonan melalui aplikasi e-Registration tepat waktu	100%	100%	100%	100%
3	Sasaran Strategis: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi				
	Persentase penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	80%	100%
	Persentase pengiriman SPT ke KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI KPP PRATAMA MADIUN

Secara umum, capaian kinerja organisasi pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tercermin dalam tabel berikut ini:

No	Indikator Kinerja Utama	Indeks Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran Strategis: Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal						
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,33	93,99	120	103,20	100,38
	Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	64,67	104,26	99,88		
	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas				107,39	109,93
Sasaran Strategis: Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi						
2	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)		92,28	120	106,39	100,29
	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,11	100,51	100,08	101,30	108,24
Sasaran Strategis: Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi						
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)		120	109,66	65,57	101,68
Sasaran Strategis: Edukasi dan pelayanan yang efektif						
4	Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	114,47	119,58	120		
	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan			111,73	101,02	107,41
	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan				120	120
Sasaran Strategis: Pengawasan pembayaran masa yang efektif						
5	Persentase pengawasan pembayaran masa		108,88	117,78	120	120

6	Sasaran Strategis: Pengujian kepatuhan material yang efektif					
	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	106,85	118,15	120	120	119,20
	Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak			111,90		
	Persentase penyampaian IDLP	120	120	120		
	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan				116,07	119,73
	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu					102,35
7	Sasaran Strategis: Penegakan hukum yang efektif					
	Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	120	120	120		
	Tingkat Efektivitas Penagihan		120	120	120	120
	Tingkat efektivitas Pemeriksaan	120	117,41	120	120	
	Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian					120
	Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan				113,10	
	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan					100
8	Sasaran Strategis: Data dan Informasi yang berkualitas					
	Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	120	120	120		
	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan				120	120
	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP				120	120
9	Sasaran Strategis: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif					
	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi		107,89	120	120	
	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM					117,14
	Indeks Penilaian Integritas Unit		120	109,58	111,79	110,74
	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko					110,74
	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	110,38	111,11	111,11		

	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator		100,58	110,04		
	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko				111,11	
Sasaran Strategis: Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel						
10	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100	103,88	96,75	97,88	
	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran					120
NILAI KINERJA ORGANISASI		107,39	107,69	112,30	105,22	109,89

*Sumber: Lakin KPP Pratama Madiun Tahun 2022,2023, dan Dialog Kinerja Organisasi Triwulan IV 2024 dan Aplikasi MandorDJP Dashboard Kinerja Organisasi

Sebagai penjelasan atas Nilai Kinerja Organisasi di atas, berikut disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

1. PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK

Berikut adalah perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya, upaya *extra effort* yang dilakukan, analisis keberhasilan dan penunjang keberhasilan capaian kinerja, kendala, analisis efisiensi sumber daya, dan rencana aksi untuk IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak.

	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100,33	93,99	120	103,20	100,38

Perbandingan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak 5 Tahun terakhir. Sumber : Laporan Kinerja KPP Pratama Madiun Tahun 2022, 2023, dan Dashboard Kinerja Aplikasi MandorDJP 2024

Berdasarkan data 5 tahun ke belakang, persentase realisasi penerimaan pajak Tahun 2024 tidak lebih tinggi dari tahun 2022 dan 2023, meskipun demikian, KPP Pratama Madiun meraih Nilai Kinerja Organisasi yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya dengan optimalisasi capaian di atas 100% pada 19 IKU Lainnya.

Berdasarkan data penerimaan pada Appportal, berikut adalah realiasi kinerja KPP Pratama Madiun tahun 2024 bila dibandingkan dengan target kerjanya:

KPP Pratama Madiun	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal						
	Persentase realisasi penerimaan pajak						
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	20,00%	45,00%	45,00%	71,00%	71,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	23,35%	52,73%	52,73%	71,71%	71,71%	100,38%	100,38%
Capaian	116,75%	117,18%	117,18%	101,00%	101,00%	100,38%	100,38%

Sumber : Aplikasi MandorDJP Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa sejak triwulan I KPP Pratama Madiun telah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dengan sangat optimal. KPP Pratama Madiun tetap dapat mencapai target penerimaan yang diamanahkan.

Deskripsi IKU : Sesuai dengan manual IKU yang telah ditetapkan, capaian kinerja penerimaan KPP Pratama Madiun tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu nilai penerimaan bruto dan nilai SPMKP. Untuk penerimaan bruto akan diuraikan secara terpisah pada pembahasan mengenai Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas. Sedangkan untuk SPMKP, aplikasi Appportal menunjukkan data sebagai berikut:

Tahun	Q1	Q2	Q3	Q4
2021	31.583.521.934	47.811.081.746	64.022.410.459	69.670.148.058
2022	20.373.366.286	21.232.621.654	25.991.447.462	51.076.981.435
2023	5.165.827.813	6.450.484.933	9.881.653.989	29.100.401.697
2024	5,058,717,473	22,155,351,674	26,053,297,813	27,056,359,179

Sumber : Lakin KPP Pratama Madiun Tahun 2023 dan Aplikasi Appportal.

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai SPMKP pada tahun 2024 lebih rendah bila dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

Formula IKU:

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Upaya *extra effort* yang dilakukan agar memperoleh keberhasilan IKU adalah karena KPP Pratama Madiun melakukan pemanfaatan data Approweb, Appportal, dan analisa laporan keuangan sesuai fokus Wajib Pajak besar sektor usaha; melakukan pengawasan (baik dengan konseling maupun visit) terhadap Wajib Pajak atas pembayaran pajak tahun berjalan, melakukan percepatan penerbitan STP serta mendorong pembayaran pajak secara tepat waktu. Serta dari sisi lainnya juga melakukan penyelesaian pemeriksaan khusus, kegiatan penagihan aktif, dan visit.

Selain itu, sinergi Pengawasan dengan Fungsional Pemeriksa Pajak juga terjalin baik dengan cukup seringnya intensitas *Sharing Session Account Representative* dan Fungsional Pemeriksa maupun seluruh seksi pendukung dalam berbagai kegiatan *Morning Activity* mingguan yang dilaksanakan di lingkungan KPP Pratama Madiun, serta dengan adanya Rapat Dialog Kinerja Organisasi Bulanan, yang juga merupakan Inovasi KPP Pratama Madiun, untuk mengamankan setiap angka realisasi Nilai Kinerja Organisasi dan menyusun mitigasi risiko dan rencana aksi bulan selanjutnya demi optimalnya pencapaian setiap IKU dalam NKO.

Berdasarkan analisis penggunaan sumber daya, hingga 31 Desember 2024 terdapat 28 orang *Account Representative* yang terbagi di 6 Seksi Pengawasan dengan 6 Kepala Seksi. Jumlah ini telah mencukupi proporsi sesuai Analisis Beban Kerja dan cukup optimal dalam pencapaian kinerja organisasi KPP Pratama Madiun secara umum.

Selanjutnya, terkait dukungan kepada Kebijakan Pemerintah, yakni efisiensi

penggunaan anggaran perjalanan dinas, pada tahun 2025 KPP Pratama Madiun akan dilaksanakan dengan lebih selektif dan efisien.

Rencana aksi selanjutnya untuk tahun 2025 adalah dengan tetap rutin melakukan Rapat Pembinaan Kepala Kantor; baik penerimaan pajak maupun kinerja akan terus dipantau harian melalui Infografis dan Dashboard Penerimaan SE-18/PJ/2020 Mandor DJP dan DRM, dan Dashboard Kinerja Organisasi MandorDJP, melakukan Rapat DKRO Bulanan, dan melakukan pendekatan kepada Wajib Pajak.

2. INDEKS REALISASI PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK BRUTO DAN DEVIASI PROYEKSI PERENCANAAN KAS

Berikut adalah perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya, upaya *extra effort* yang dilakukan, analisis keberhasilan dan penunjang keberhasilan capaian kinerja, kendala, analisis efisiensi sumber daya, dan rencana aksi untuk IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas.

KPP Pratama Madiun	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal						
	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas						
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	116,27	115,00%	115,00%	110,00%	110,00%	109,93%	109,93%
Capaian	116,27%	115,00%	115,00%	110,00%	110,00%	109,93%	109,93%

Sumber : Aplikasi MandorDJP Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto	64.67	104,26	99.88		
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas				107,39	109,93

Perbandingan capaian kinerja IKU terkait pada 5 tahun terakhir, Pada Tahun 2024 capaian untuk IKU tersebut merupakan capaian tertinggi selama 5 tahun terakhir

Formula IKU dan Perhitungan beberapa Variabel Kontrak Kinerja Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas Tahun 2024 :

Komponen Realisasi Growth Bruto	Komponen Deviasi Akurasi Perencanaan Kas	Konversi Bruto	Konversi Deviasi	Komponen Bruto	Komponen Deviasi	Realisasi IKU
119.85%	5.50%	119.85%	100%	59.93	50	109.93

Deskripsi IKU : Deviasi proyeksi perencanaan kas ditentukan oleh:

1. penerimaan kas antara tanggal 1 sampai dengan 15 setiap bulannya ditambah
2. informasi penerimaan tanggal 16 sampai dengan akhir bulan, terutama proyeksi penerimaan PPN Wajib Pajak Besar dari Seksi Pengawasan;
3. informasi penerimaan yang sifatnya tidak rutin,
4. informasi kegiatan penggalan potensi oleh Seksi Pengawasan dan Fungsional Pemeriksa Pajak, dan
5. informasi besarnya restitusi yang akan keluar dari Seksi Pelayanan.

Kontrak Kinerja menetapkan bahwa target indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas 100%, KPP Pratama Madiun telah berhasil mencapai angka 109,93%.

Upaya *extra effort* yang telah dilakukan selama tahun 2024 antara lain koordinasi yang intensif dengan Seksi Pengawasan, Fungsional Pemeriksa Pajak, dan Seksi Pelayanan. Keberhasilan Capaian IKU tidak terlepas dari upaya yang dilakukan dengan membuat analisis per-Wajib Pajak per jenis pajak khususnya untuk Wajib Pajak Besar.

Terkait analisis efisiensi penggunaan sumber daya, selama tahun 2024 Seksi Penjamin Kualitas Data (PKD) terdiri atas dua orang Pelaksana berperan untuk membuat proyeksi deviasi penerimaan kas dan dua orang administrator sistem, yang mana berperan untuk menyajikan data sebagai sarana gali potensi. Ke depannya untuk tahun 2025, Seksi PKD akan melaksanakan rencana aksi yakni mencari sumber-sumber informasi yang lebih akurat dari Seksi Pengawasan dan Seksi Pelayanan. Adapun Rekapitulasi Penerimaan KPP Pratama Madiun selama tiga tahun terakhir berdasarkan MPN (Appportal) tersaji pada Lampiran.

3. PERSENTASE CAPAIAN TINGKAT KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN DAN ORANG PRIBADI

Berikut adalah perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya, upaya *extra effort*, analisis keberhasilan dan penunjang keberhasilan capaian kinerja, kendala, analisis efisiensi sumber daya, dan rencana aksi untuk IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh WP OP dan Badan.

Berdasarkan data aplikasi Mandor DJP, selama tahun 2024 KPP Pratama Madiun berhasil melampaui target kepatuhan SPT yang telah ditetapkan sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini. Terdapat penurunan realisasi kepatuhan SPT karena terdapat kenaikan target kepatuhan SPT pada tahun berjalan:

KPP	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi						
Pratama Madiun	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi						
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	60%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	93,92%	105,68%	105,68%	107,56%	107,56%	108,24%	108,24%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	119,51%	119,51%	108,24%	108,24%

Sumber : Aplikasi MandorDJP Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024

	2022	2023	2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,8	101,30	108,24

Perbandingan capaian kinerja IKU terkait pada 3 tahun terakhir

Jika dibandingkan dengan Tahun 2022 dan 2023, capaian kepatuhan SPT Tahun 2024 adalah yang paling tinggi. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang telah dilaksanakan KPP Pratama Madiun dalam meningkatkan dan mempercepat pencapaian SPT Tahunan, yaitu:

- Pembentukan Satgas SPT Tahunan dengan ditetapkannya Keputusan Kepala KPP Pratama Madiun. Salah satu tugas Satgas SPT Tahunan adalah memberikan layanan dan bimbingan tatap muka kepada Wajib Pajak yang datang langsung ke KPP Pratama Madiun yang akan melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan;
- Pelaksanaan Program Desa Patuh, dimana KPP Pratama Madiun meminta komitmen perangkat desa dalam mendorong warganya untuk segera melaporkan SPT Tahunan;
- Program Kolaktelo (Kolaborasi, Fasilitasi, dan Konsultasi Pendaftaran *e-katalog* Lokal), dimana KPP Pratama Madiun bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membuka layanan perpajakan berupa pendaftaran NPWP, pelaporan SPT Tahunan, konsultasi dan layanan perpajakan lainnya, di luar layanan yang dibuka di Mall Pelayanan Publik (MPP);
- Pembukaan layanan perpajakan (pelaporan SPT Tahunan) pada Hari Sabtu dan Minggu, sehingga mempermudah Wajib Pajak yang tidak bisa meluangkan waktunya pada hari kerja untuk tetap mendapatkan layanan perpajakan;
- Pelaksanaan *outbond call* kepada sejumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum menyampaikan SPT Tahunan.

Rencana Aksi yang akan dilakukan pada Tahun 2025 adalah melaksanakan himbauan penyampaian SPT Tahunan, melaksanakan Layanan di Luar Kantor, koordinasi ke desa/kelurahan terkait pelaporan SPT Tahunan warga di wilayahnya, dan seluruh *extra effort* yang telah dilaksanakan di tahun sebelumnya yakni di Tahun 2024. Perlu disampaikan bahwa pada Tahun 2024 KPP Pratama Madiun meraih Juara III dalam Lomba Kantor Pelayanan Terbaik tingkat Kanwil, dengan berbagai inovasi dan peningkatan sarana prasarana, termasuk

memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) dengan memasang alat bantu *guiding block* bagi pengguna layanan yang membutuhkan khusus, Parkir khusus disabilitas, parkir khusus perempuan, serta peningkatan sarana prasarana di ruang laktasi KPP Pratama Madiun.

4. PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK DARI KEGIATAN PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA (PPM)

Berikut adalah perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya, upaya *extra effort*, analisis keberhasilan dan penunjang keberhasilan capaian kinerja, kendala, analisis efisiensi sumber daya, dan rencana aksi untuk IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).

Berdasarkan data aplikasi Mandor DJP, selama tahun 2024 KPP Pratama Madiun berhasil melampaui target penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yang telah ditetapkan sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

KPP Pratama Madiun	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi						
	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)						
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	20,00%	45,00%	45,00%	71,00%	71,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	24,47%	54,48%	54,48%	72,13%	72,13%	100,29%	100,29%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	101,59%	101,59%	100,29%	100,29%

Sumber : Aplikasi MandorDJP Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024

IKU	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	120	106,39	100,29

Perbandingan capaian kinerja IKU terkait pada 3 tahun terakhir

Deskripsi IKU : Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak. Manual IKU menunjukkan bahwa perhitungan atas capaian PPM dilakukan berdasarkan target yang diusulkan oleh Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II.

Formula IKU :

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

Secara umum, bila dibandingkan dengan capaian IKU tahun sebelumnya, capaian IKU PPM per triwulan pada tahun 2024 cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan capaian IKU PPM untuk periode yang sama pada

tahun 2022 maupun 2023. Perubahan target angka mutlak pada tengah tahun dan akhir tahun dari Kanwil DJP Jawa Timur II menyebabkan capaian PPM KPP Pratama Madiun cenderung rendah.

Extra Effort dan keberhasilan IKU dikarenakan KPP Pratama Madiun melakukan pemanfaatan data pada aplikasi Approweb, Appportal, dan analisa laporan keuangan sesuai fokus Wajib Pajak besar sektor usaha; melakukan pengawasan (baik dengan konseling maupun visit) terhadap Wajib Pajak atas pembayaran pajak tahun berjalan. Selain itu, sinergi Pengawasan dengan seluruh Seksi pendukung juga baik, dibuktikan dalam berbagai kegiatan *Morning Activity* mingguan yang dilaksanakan di lingkungan KPP Pratama Madiun, serta adanya Rapat Dialog Kinerja Organisasi Bulanan, yang juga merupakan Inovasi KPP Pratama Madiun, untuk mengamankan setiap angka realisasi Nilai Kinerja Organisasi dan menyusun mitigasi risiko dan rencana aksi bulan selanjutnya demi optimalnya pencapaian setiap IKU dalam NKO.

Sedangkan jika dilihat berdasarkan analisis penggunaan sumber daya, hingga 31 Desember 2024 terdapat 28 *Account Representative* yang terbagi di 6 Seksi Pengawasan dengan 6 Kepala Seksi. Jumlah ini telah mencukupi proporsi sesuai Analisis Beban Kerja dan cukup optimal dalam pencapaian kinerja organisasi KPP Pratama Madiun secara umum. Selanjutnya, terkait dukungan kepada Kebijakan Pemerintah, yakni efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas, pada tahun 2025 KPP Pratama Madiun akan dilaksanakan dengan lebih selektif dan efisien.

Rencana aksi selanjutnya untuk tahun 2025 adalah dengan dilakukannya Rapat Pembinaan Kepala Kantor, baik penerimaan pajak maupun kinerja akan terus dipantau harian melalui Infografis dan Dashboard Penerimaan SE-18/PJ/2020 Mandor DJP dan DRM, dan Dashboard Kinerja Organisasi Mandor DJP, Rapat DKRO Bulanan, MOTIVASI Triwulanan, dan melakukan pendekatan kepada Wajib Pajak.

5. PERSENTASE REALISASI PENERIMAAN PAJAK DARI KEGIATAN PENGUJIAN KEPATUHAN MATERIAL (PKM)

Berikut adalah perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya, upaya *extra effort*, analisis keberhasilan dan penunjang keberhasilan capaian kinerja, kendala, analisis efisiensi sumber daya, dan rencana aksi untuk IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Berdasarkan data pada aplikasi Mandor DJP, berikut adalah realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM), Tahun 2024 capaian PKM meningkat pesat jika dibanding Tahun 2023 tergambar sebagai berikut:

KPP Pratama Madiun	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi						
	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)						
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	20,04%	58,40%	58,40%	65,66%	65,66%	101,68%	101,68%
Capaian	80,16%	116,80%	116,80%	87,55%	87,55%	101,68%	101,68%

Sumber : Aplikasi MandorDJP Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024

IKU	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	109,66	65,57	101,68

Perbandingan capaian kinerja IKU terkait pada 3 tahun terakhir

Pada tahun 2024, KPP Pratama Madiun berhasil mencapai Penerimaan PKM di angka Rp46.345.494.260,- melebihi target yang diberikan yakni Rp45.581.050.000,-. Dari target angka mutlak tersebut, aplikasi *Dasboard Revenue Management (DRM)* mencatat realisasi target untuk setiap kegiatan adalah sebagai berikut:

- Pengawasan & PKM Lainnya 102,07 %
- Pemeriksaan 100,32 %
- Penegakan Hukum 100,51 %
- Penagihan 100,96 %
- Edukasi 101,11%

Extra Effort dan keberhasilan IKU adalah karena KPP Pratama Madiun melakukan pemanfaatan data Approweb, Appportal, dan analisa laporan keuangan sesuai fokus Wajib Pajak besar sektor usaha; percepatan penerbitan STP serta mendorong pembayaran tepat waktu, penyelesaian pemeriksaan khusus, kegiatan penagihan aktif, dan visit. Selain itu, sinergi Pengawasan dengan Fungsional Pemeriksa juga terjalin baik dengan cukup seringnya intensitas *Sharing Session Account Representative* dan Fungsional Pemeriksa dalam berbagai kegiatan *Morning Activity* mingguan yang dilaksanakan di lingkungan KPP Pratama Madiun, serta adanya Rapat Dialog Kinerja Organisasi Bulanan, yang juga merupakan Inovasi KPP Pratama Madiun, untuk mengamankan setiap angka realisasi Nilai Kinerja Organisasi dan menyusun mitigasi risiko dan rencana aksi bulan selanjutnya demi optimalnya pencapaian setiap IKU dalam NKO.

Analisis penggunaan sumber daya, hingga 31 Desember 2024 terdapat 28 Account Representative yang terbagi di 6 Seksi Pengawasan dengan 6 Kepala Seksi, serta 1 Supervisor dan 7 Fungsional Pemeriksa Pajak. Jumlah ini telah mencukupi proporsi sesuai Analisis Beban Kerja dan cukup optimal dalam pencapaian kinerja organisasi KPP Pratama Madiun secara umum. Selanjutnya,

terkait dukungan kepada Kebijakan Pemerintah, yakni efisiensi penggunaan

anggaran perjalanan dinas, pada tahun 2025 KPP Pratama Madiun terkait perjalanan dinas akan dilaksanakan dengan lebih selektif dan efisien.

Terdapat kendala pada tahun berjalan untuk realisasi IKU PKM karena PKM Pemeriksaan belum tercapai, disebabkan pendeknya jangka waktu pembayaran oleh Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan, sehingga untuk Wajib Pajak yang melakukan pembayaran setelah 30 hari, akan terekam sebagai penerimaan di Penagihan. Jika jangka waktu pembayaran WP Pemeriksaan diperpanjang hingga 90 hari, hal tersebut dapat memungkinkan PKM dari Pemeriksaan dapat tercapai lebih optimal.

Rencana aksi selanjutnya untuk Tahun 2025 adalah Rapat Pembinaan oleh Kepala Kantor, Pemanfaatan data Approweb, merealisasikan perencanaan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang sudah dibuat, apportal serta analisa laporan keuangan sesuai fokus Wajib Pajak besar sektor usaha.

6. PERSENTASE PERUBAHAN PERILAKU LAPOR DAN BAYAR ATAS KEGIATAN EDUKASI DAN PENYULUHAN

Berikut adalah perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya, upaya *extra effort*, analisis keberhasilan dan penunjang keberhasilan capaian kinerja, kendala, analisis efisiensi sumber daya, dan rencana aksi untuk IKU Persentase Perubahan Perilaku Laporan dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan.

KPP Pratama Madiun	Edukasi dan pelayanan yang efektif						
	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan						
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	31,40%	81,48%	81,48%	88,80%	88,80%	88,80%	88,80%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi MandorDJP Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024

IKU	2022	2023	2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan		120	120
Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	120		

Perbandingan capaian kinerja IKU terkait pada 3 tahun terakhir

Deskripsi IKU : Manual IKU menetapkan bahwa kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- a. Tema I – meningkatkan kesadaran pajak
- b. Tema II – meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pajak

c. Tema III – meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku dengan mencakup tiga Sub IKU, yang terdiri dari kegiatan, perubahan perilaku lapor, dan perubahan perilaku bayar.

KPP Pratama Madiun dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokok kegiatan edukasi dan penyuluhan memiliki satu tim penyuluhan yang terdiri dari 1 Fungsional Penyuluh Pajak Pertama, 2 Asisten Penyuluh Pajak Mahir, dan 2 Asisten Pajak Terampil.

Berdasarkan data pada Mandor DJP, efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada Wajib Pajak tahun 2024 telah berjalan efektif. Dari target persentase efektivitas yang telah ditetapkan sebesar 74%, KPP Pratama Madiun telah berhasil mencapai angka 88,40%

Tujuan dari kegiatan edukasi dan penyuluhan adalah menunjang peningkatan pendapatan, peningkatan kepercayaan stakeholder, dan peningkatan kepatuhan Wajib

Pajak menuju pengamanan pendapatan negara yang terwujud dalam bentuk perubahan perilaku laporan dan perilaku bayar dari Wajib Pajak yang telah mengikuti kegiatan edukasi dan penyuluhan. Berdasarkan Wajib Pajak yang menghadiri kegiatan edukasi dan penyuluhan Tema III, sebanyak 120% mengalami perubahan perilaku lapor dan sebanyak 104,79% mengalami perubahan perilaku bayar dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, KPP Pratama Madiun melaksanakan edukasi persiapan implementasi aplikasi Coretax secara masif melalui luring maupun daring. Wajib Pajak yang hadir pada kegiatan tersebut sebanyak 211 pada tahap I dan 906 pada tahap II dan III. Setiap kegiatan daring melalui *IG Live*, siaran radio, iklan melalui media masa dan media masa, dan media lainnya, kami terus mengedukasi terkait aplikasi Coretax. Pada tahun 2025, KPP Pratama Madiun akan lebih menguatkan kolaborasi dengan *stakeholder* seperti pemerintah daerah dan desa, ikatan/asosisasi/perkumpulan pengusaha, dan pihak berkepentingan lainnya agar implementasi aplikasi Coretax bisa dijalankan dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak di wilayah kerja KPP Pratama Madiun.

Pada tahun 2024 kegiatan edukasi dan penyuluhan diberi tugas dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Material *Wider Revenue Activities* (PKM WRA) melalui perubahan perilaku bayar Wajib Pajak. Berdasarkan data *Dasboard Revenue Management* (DRM) memiliki realisasi PKM WRA Edukasi sebesar 348% dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian PKM WRA Edukasi tersebut, KPP Pratama Madiun berfokus kepada Wajib Pajak yang belum beralih penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) dari PPh Final UMKM PP55 ke PPh Tarif Pasal 17. Pada tahun 2025, KPP Pratama akan tetap melanjutkan hal tersebut serta memaksimalkan data yang terdapat pada *Smarboard* 3.0. Perlu disampaikan bahwa pada tahun 2024 KPP Pratama Madiun meraih Juara III dalam Lomba Kantor Pelayanan Terbaik tingkat

Kanwil, dengan berbagai inovasi dan peningkatan sarana prasarana, termasuk memperhatikan *Gender Equality, Disabilty, and Social Inclusion* (GEDSI) dengan memasang alat bantu *guiding block* bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus, Parkir khusus disabilitas, parkir khusus perempuan, serta peningkatan sarana

prasarana di ruang laktasi KPP Pratama Madiun.

7. INDEKS EFEKTIVITAS PENYULUHAN DAN PELAYANAN

Berikut adalah perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya, upaya *extra effort*, analisis keberhasilan dan penunjang keberhasilan capaian kinerja, kendala, analisis efisiensi sumber daya, dan rencana aksi untuk IKU Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan.

KPP Pratama Madiun	Edukasi dan pelayanan yang efektif						
	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan						
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	6,27%	12,27%	12,27%	18,00%	18,00%	107,41%	107,41%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	107,41%	107,41%

Sumber : Aplikasi MandorDJP Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	110,59	107,76	111,73	101,02	107,41

Perbandingan capaian kinerja IKU terkait pada 5 tahun terakhir

Deskripsi IKU : Indeks Efektifitas Penyuluhan dan Pelayanan diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei dilaksanakan pada tahun berjalan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak *surveyor* dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja KPP Pratama Madiun.

Dengan menggunakan target sebesar 85 sebagai acuan, dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Madiun telah berhasil mencapai target Indeks Efektivitas Penyuluhan dan Pelayanan dan meningkat jika dibandingkan tahun 2023, namun tidak lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan pada tahun 2022.

Formula IKU : Indeks hasil Survei Kontrak Kinerja menetapkan bahwa target indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan untuk tahun 2024 adalah 85. Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang efektif pada Internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain tingkat kepuasan pengguna layanan DJP dan tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan.

Selanjutnya, berdasarkan nota dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat nomor ND-2057/PJ.09/2024 tanggal 18 Novemembr 2024 tentang Penyampaian Hasil Laporan Survei serta Permintaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Survei Hasil Survei Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan Tahun 2024, KPP Pratama Madiun berhasil mendapatkan indeks nilai 89,41, melebihi target yang telah ditetapkan. Hal tersebut tidak luput dengan penerapan standar

layanan yang konsisten dan berkelanjutan dilakukan oleh KPP Pratama Madiun, sehingga Wajib Pajak merasa nyaman dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung pun mendukung hasil survei yang sangat baik tersebut. Pada tahun 2025, KPP Pratama Madiun akan terus melakukan terobosan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada Wajib Pajak, salah satunya dengan fitur monitoring antrian yang bisa diakses pada <https://pecel.in/antrian-tpt.html>.

Perlu disampaikan bahwa pada tahun 2024 KPP Pratama Madiun meraih Juara III dalam Lomba Kantor Pelayanan Terbaik tingkat Kanwil, dengan berbagai inovasi dan peningkatan sarana prasarana, termasuk memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* dengan memasang alat bantu *guiding block* bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus, Parkir khusus disabilitas, parkir khusus perempuan, serta peningkatan sarana prasarana di ruang laktasi KPP Pratama Madiun.

8. PERSENTASE PENGAWASAN PEMBAYARAN MASA

Berikut adalah perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya, upaya *extra effort*, analisis keberhasilan dan penunjang keberhasilan capaian kinerja, kendala, analisis efisiensi sumber daya, dan rencana aksi untuk IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa :

KPP Pratama Madiun	Pengawasan pembayaran masa yang Efektif						
	Persentase pengawasan pembayaran masa						
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	N/A	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	N/A	116,28%	116,28%	114,00%	114,00%	117,00%	117,00%
Capaian	0,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi MandorDJP Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024

IKU	2022	2023	2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	117,78	120	120

Perbandingan capaian kinerja IKU terkait pada 3 tahun terakhir

Mandor DJP menunjukkan bahwa selama tahun 2024 KPP Pratama Madiun berhasil melampaui target persentase pengawasan pembayaran masa yang telah ditetapkan.

Deskripsi IKU : Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- a. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- b. Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan).

Formula IKU : '(50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)).

Extra Effort dan keberhasilan IKU dapat dicapai karena KPP Pratama Madiun senantiasa

menerbitkan STP, melakukan himbauan SP2DK berkualitas, melakukan konseling, visit, dan koordinasi dengan Wajib Pajak. Selain itu, sinergi Pengawasan dengan Fungsional Pemeriksa juga terjalin baik dengan cukup seringnya intensitas Sharing Session Account Representative dan Fungsional Pemeriksa dalam berbagai kegiatan Morning Activity mingguan yang dilaksanakan di lingkungan KPP Pratama Madiun, serta adanya Rapat Dialog Kinerja Organisasi Bulanan, yang juga merupakan Inovasi KPP Pratama Madiun, untuk mengamankan setiap angka realisasi Nilai Kinerja Organisasi dan menyusun mitigasi risiko dan rencana aksi bulan selanjutnya demi optimalnya pencapaian setiap IKU dalam NKO.

Analisis penggunaan sumber daya, hingga 31 Desember 2024 terdapat 28 *Account Representative* yang terbagi di 6 Seksi Pengawasan dengan 6 Kepala Seksi, serta 1 Supervisor dan 7 Fungsional Pemeriksa Pajak. Jumlah ini telah mencukupi proporsi sesuai Analisis Beban Kerja dan cukup optimal dalam pencapaian kinerja organisasi KPP Pratama Madiun secara umum. Selanjutnya, terkait dukungan kepada Kebijakan Pemerintah, yakni efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas, pada tahun 2025 KPP Pratama Madiun terkait perjalanan dinas akan dilaksanakan dengan lebih selektif dan efisien.

Rencana aksi selanjutnya untuk tahun 2025 adalah Rapat Pembinaan oleh Kepala Kantor, menerbitkan STP dengan optimal, melakukan himbauan SP2DK berkualitas dan optimal, serta optimalisasi konseling, visit, dan koordinasi dengan Wajib Pajak, MOTIVASI Triwulanan dan DKRO bulanan.

9. PERSENTASE PENYELESAIAN PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN

Berikut adalah perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya, upaya *extra effort*, analisis keberhasilan dan penunjang keberhasilan capaian kinerja, kendala, analisis efisiensi sumber daya, dan rencana aksi untuk IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan :

KPP Pratama Madiun	Pengujian kepatuhan material yang efektif						
	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan						
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	N/A	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	119,20%	119,20%
Capaian	0,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	119,20%	119,20%

Sumber : Aplikasi MandorDJP Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024

IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	106,85	118,15	120	120	119,20

Perbandingan capaian kinerja IKU terkait pada 5 tahun terakhir

Deskripsi IKU : Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Formula IKU : $(50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)})$

Berdasarkan aplikasi Mandor DJP, capaian IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 100%, KPP Pratama Madiun berhasil mencapai angka 120% selama triwulan I, II, III, dan IV.

Extra Effort dan keberhasilan IKU dapat tercapai karena KPP Pratama Madiun senantiasa melakukan koordinasi antar seksi dengan baik; pembuatan LHPt dan KKPt secara komprehensif; Pemanfaatan data eksternal dan internal (salah satunya data pemicu dan pengujian); *advisory visit*, konseling, dan wawancara. Selain itu, sinergi Pengawasan dengan Fungsional Pemeriksa juga terjalin baik dengan cukup seringnya intensitas *Sharing Session Account Representative* dan Fungsional Pemeriksa dalam berbagai kegiatan *Morning Activity* mingguan yang dilaksanakan di lingkungan KPP Pratama Madiun, serta adanya Rapat Dialog Kinerja Organisasi Bulanan, yang juga merupakan Inovasi KPP Pratama Madiun, untuk mengamankan setiap angka realisasi Nilai Kinerja Organisasi dan menyusun mitigasi risiko dan rencana aksi bulan selanjutnya demi optimalnya pencapaian setiap IKU dalam NKO.

Analisis penggunaan sumber daya, hingga 31 Desember 2024 terdapat 28 *Account Representative* yang terbagi di 6 Seksi Pengawasan dengan 6 Kepala Seksi, serta 1 Supervisor dan 7 Fungsional Pemeriksa Pajak. Jumlah ini telah mencukupi proporsi sesuai Analisis Beban Kerja dan cukup optimal dalam pencapaian kinerja organisasi KPP Pratama Madiun secara umum. Selanjutnya, terkait dukungan kepada Kebijakan Pemerintah, yakni efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas, pada tahun 2025 KPP Pratama Madiun akan dilaksanakan dengan lebih selektif dan efisien.

Rencana aksi selanjutnya untuk Tahun 2025 adalah Rapat Pembinaan oleh Kepala

Kantor, melakukan koordinasi antar seksi dengan baik; Pembuatan LHPT dan KKPT secara komprehensif; pemanfaatan data eksternal dan internal (salah satunya data pemicu dan penguji); *advisory visit*, konseling, dan wawancara; sinergi antara Pengawasan dengan Fungsional Pemeriksa.

10. PERSENTASE PEMANFAATAN DATA SELAIN TAHUN BERJALAN

Berikut adalah perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya, upaya *extra effort*, analisis keberhasilan dan penunjang keberhasilan capaian kinerja, kendala, analisis efisiensi sumber daya, dan rencana aksi untuk IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan :

KPP Pratama Madiun	Pengujian kepatuhan material yang efektif						
	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan						
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	N/A	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	N/A	116,73%	116,73%	117,37%	117,37%	119,73%	119,73%
Capaian	0,00%	116,73%	116,73%	117,37%	117,37%	119,73%	119,73%

Sumber : Aplikasi MandorDJP Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024

Perbandingan Capaian IKU dengan tahun sebelumnya	2023	2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	116,07	119,73

Deskripsi IKU: IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan merupakan rata-rata capaian pemanfaatan data selain tahun berjalan yang terdiri dari dua komponen, yaitu pemanfaatan data STP dan *data matching*.

Formula IKU :
$$\frac{(Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ STP) + (Capaian\ Pemanfaatan\ Data\ Matching)}{2}$$

Extra Effort dan keberhasilan IKU dapat tercapai karena KPP Pratama Madiun senantiasa melakukan koordinasi antar seksi dengan baik; pembuatan LHPT dan KKPT secara komprehensif; Pemanfaatan data eksternal dan internal (salah satunya data pemicu dan penguji); *advisory visit*, konseling, dan wawancara. Selain itu, sinergi Pengawasan dengan Fungsional Pemeriksa juga terjalin baik dengan cukup seringnya intensitas *Sharing Session Account Representative* dan Fungsional Pemeriksa dalam berbagai kegiatan *Morning Activity* mingguan yang dilaksanakan di lingkungan KPP Pratama Madiun, serta adanya Rapat Dialog Kinerja Organisasi Bulanan, yang juga merupakan Inovasi KPP Pratama Madiun, untuk mengamankan setiap angka realisasi Nilai Kinerja Organisasi dan menyusun mitigasi risiko dan rencana aksi bulan selanjutnya demi optimalnya pencapaian setiap IKU dalam NKO.

Analisis penggunaan sumber daya, hingga 31 Desember 2024 terdapat 28 *Account Representative* yang terbagi di 6 Seksi Pengawasan dengan 6 Kepala Seksi, serta 1 Supervisor dan 7 Fungsional Pemeriksa Pajak. Jumlah ini telah mencukupi proporsi sesuai Analisis Beban Kerja dan cukup optimal dalam pencapaian kinerja organisasi KPP Pratama Madiun secara umum. Selanjutnya, terkait dukungan

kepada Kebijakan Pemerintah, yakni efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas, pada tahun 2025 KPP Pratama Madiun akan dilaksanakan dengan lebih selektif dan efisien.

Rencana aksi selanjutnya untuk tahun 2025 adalah menerbitkan dan menindaklanjuti data pada dafnom STP; Pemanfaatan dan penyelesaian data matching, DKRO Bulanan dan MOTIVASI Triwulanan.

11. EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KOMITE KEPATUHAN WAJIB PAJAK KPP TEPAT WAKTU

Berikut adalah perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya, upaya extra effort, analisis keberhasilan dan penunjang keberhasilan capaian kinerja, kendala, analisis efisiensi sumber daya, dan rencana aksi untuk Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan WP KPP tepat waktu :

KPP Pratama Madiun	Pengujian kepatuhan material yang efektif						
	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu						
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	91,60%	91,60%	102,35%	102,35%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	91,60%	91,60%	102,35%	102,35%

Sumber : Aplikasi MandorDJP Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024

Perlu disampaikan bahwa IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan WP KPP tepat waktu merupakan IKU baru yang muncul di tahun 2024 sehingga capaian nya tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Deskripsi IKU : Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Formula IKU : Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

= 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

Breakdown formula IKU :

- Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu (bobot 30%) = (akumulasi poin penyelesaian laporan / akumulasi target poin) x 100%
- Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)= nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor
- Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM

$$\text{Pemeriksaan (bobot 30\%)} = \frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}} \times 100\%$$

KPP Pratama Madiun berhasil mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024 karena ada upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan yakni : Melaksanakan monitoring capaian PKM, melakukan pelaporan pelaksanaan tugas komite kepatuhan tepat waktu, mempersiapkan bahan baku pemeriksaan. Hal ini juga akan diterapkan dalam rencana aksi tahun 2025.

Namun demikian, unit kerja sempat mendapatkan kendala hingga triwulan III dimana capaian IKU tersebut masih di bawah 100%. Akar masalah dan kendala tersebut antara lain : PKM Pemeriksaan belum tercapai, disebabkan pendeknya jangka waktu pembayaran oleh Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan, sehingga untuk Wajib Pajak yang melakukan pembayaran setelah 30 hari, akan terekam sebagai penerimaan di Penagihan. Selanjutnya, jika jangka waktu pembayaran WP Pemeriksaan diperpanjang hingga 90 hari, hal tersebut dapat memungkinkan PKM dari Pemeriksaan dapat tercapai lebih optimal.

Kemudian kendala yang terakhir adalah tidak adanya ruang terbit sehingga tidak semua usulan pemeriksaan berdasarkan DSPP dapat dikirim. Selain itu, nilai potensi usulan pemeriksaan DSPP relatif kecil, untuk mencapai target angka mutlak perlu Wajib Pajak (WP) dalam jumlah cukup banyak yang diusulkan pemeriksaan. Kebutuhan jumlah WP yang diusulkan pemeriksaan untuk memenuhi angka mutlak usulan, belum dapat tercukupi dengan ruang terbit yang ada saat ini.

12. TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN

Berikut adalah perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya, upaya *extra effort*, analisis keberhasilan dan penunjang keberhasilan capaian kinerja, kendala, analisis efisiensi sumber daya, dan rencana aksi untuk Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian:

KPP Pratama Madiun	Penegakan hukum yang efektif						
	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian						
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi MandorDJP Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas Pemeriksaan	120	117,41	120	120	
Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian					120

Perbandingan capaian kinerja IKU terkait pada 5 tahun terakhir

Deskripsi IKU : Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur melalui 5 variabel yaitu:
 a. Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi
 b. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan

- c. Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan
- d. Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu
- e. Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu. Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- A. Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- B. Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Formula IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian:

$$\begin{aligned} & (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) \\ & + \\ & (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%) \end{aligned}$$

Keterangan : capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

Perhitungan beberapa Variabel Kontrak Kinerja Tingkat Efektivitas Pemeriksaan 2024 adalah

NAMA IKU / VARIABEL		Bobot	Target	Realisasi	Capaian	
TINGKAT EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN		100%	80%	105,30%	120,00%	
		a	b	c	d = c : b	e = d x a
a.	Persentase Nilai skp terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP	25%	75%	83,36%	111,14%	27,79%
b.	Persentase Nilai skp disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan	25%	40%	57,04%	120,00%	30,00%
c.	Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan	25%	100%	70,07%	70,07%	17,52%
d.	Persentase Penyelesaian Pemeriksaan tepat waktu	20%	70%	90,48%	120,00%	24,00%
e.	Persentase ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi	5%	70%	91,18%	120,00%	6,00%

Kontrak Kinerja menetapkan bahwa target Tingkat Efektivitas Pemeriksaan 80%, KPP Pratama Madiun telah berhasil mencapai angka 105,3%.

Upaya *Extra Effort* yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024 :

- Melakukan koordinasi dengan Seksi Pengawasan perihal penyediaan bahan baku pemeriksaan melalui DSPP Kolaboratif maupun DSPP *Reguler Bussiness Process* (RBP).
- Melakukan pemantauan proses pemeriksaan dan koordinasi dengan Fungsional Pemeriksa Pajak (FPP) perihal jangka waktu pemeriksaan demi memitigasi risiko jangka waktu penyelesaian pemeriksaan yang terlalu lama.

Analisis keberhasilan capaian IKU

- IKU dapat tercapai optimal setiap triwulan, yakni 120%, antara lain karena Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan senantiasa melakukan pencatatan proses pemeriksaan sehingga dapat dipantau tahapan-tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh FPP.
- Mengalokasikan satu pegawai khusus sebagai petugas pemeriksa untuk pemeriksaan tujuan lain berupa penghapusan NPWP OP dan pencabutan PKP.
- Melakukan koordinasi dan bedah WP dengan Seksi Pengawasan dan FPP mengenai penyediaan bahan baku pemeriksaan sehingga ada kesamaan persepsi antara Seksi Pengawasan dan FPP terhadap WP yang diusulkan pemeriksaan.

Analisis efisiensi sumber daya

Di tahun 2024 terdapat 3 Pelaksana pemeriksaan dengan pembagian tugas yaitu:

- 2 (dua) orang untuk administrasi pemeriksaan dengan tugas melakukan administrasi dan pengawasan atas pemeriksaan yang dilakukan oleh FPP
- 1 (satu) orang petugas pemeriksa pajak merangkap pelaksana penagihan untuk tugas pemeriksaan tujuan lain penghapusan NPWP OP dan pencabutan PKP

Secara umum, tugas pemeriksaan di Seksi P3 dapat tertangani dengan baik, semua pelaksana pemeriksaan telah memahami tugas masing-masing dan bisa saling membantu.

Rencana aksi Tahun 2025

- Melakukan penyegaran berupa rotasi tugas pegawai di Seksi P3 agar seluruh pelaksana P3 mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai seluruh tugas dan fungsi seksi P3;
- Melakukan koordinasi dengan Seksi Pengawasan untuk penyediaan bahan baku pemeriksaan melalui penyusunan DSPP Kolaboratif dan DSPP RBP;
- Penyamaan persepsi antara Seksi Pengawasan, AR dan FPP mengenai kondisi WP yang diusulkan pemeriksaan;
- Pencatatan dan pemantauan proses pemeriksaan.

13. TINGKAT EFEKTIVITAS PENAGIHAN

Berikut adalah perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya, upaya *extra effort* analisis

keberhasilan dan penunjang keberhasilan capaian kinerja, kendala, analisis efisiensi sumber daya, dan rencana aksi untuk Tingkat efektivitas penagihan :

KPP Pratama Madiun	Penegakan hukum yang efektif						
	Tingkat efektivitas penagihan						
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	32,56%	71,75%	71,75%	96,86%	96,86%	110,00%	110,00%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi MandorDJP Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024

	2022	2023	2023
Tingkat Efektivitas Penagihan	120	120	120

Perbandingan capaian kinerja IKU terkait pada 3 tahun terakhir

Deskripsi IKU : tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari tiga variabel, yaitu:

- a. Variabel tindakan penagihan
- b. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC)
- c. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC)

Formula IKU : $(50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC})$

Kegiatan	Target	Realisasi	% realisasi	Maks 120%	Bobot	Efektifitas Penagihan
Surat Teguran	2.711	3.013	111,14%	111,14%	27,58%	30,65%
Surat paksa	928	1.336	143,97%	120,00%	35,61%	42,73%
Penyitaan	50	58	116,00%	116,00%	8,47%	9,83%
Pemblokiran	25	25	100,00%	100,00%	20%	19,58%
Penjualan Barang Sitaan	8	10	125,00%	120,00%	6,62%	7,94%
Pencegahan	1	0	0,00%	0,00%	2,14%	0,00%
Total						110,73%

Kontrak Kinerja menetapkan bahwa target Tingkat Efektivitas Penagihan 75%, KPP Pratama Madiun telah berhasil mencapai angka 110,73%.

Analisis *extra effort* :

- Melakukan persuasi dan tindakan penagihan aktif terhadap WP yang mempunyai tunggakan yang telah berkekuatan hukum tetap di tahun 2024

- Melakukan persuasi dan tindakan penagihan aktif terhadap Perhutani yang mempunyai tunggakan STP PBB tahun 2022 dan 2023 yang bernilai cukup besar

Analisis keberhasilan dan penunjang keberhasilan:

Untuk WP dalam Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC), dilakukan hal-hal yakni Menyusun DSPC dengan mempertimbangkan kemampuan bayar WP, Melakukan persuasi, dan Melakukan tindakan penagihan aktif. Sedangkan untuk WP di luar DSPC adalah Melakukan persuasi dan tindakan penagihan aktif terhadap WP yang mempunyai tunggakan yang telah berkekuatan hukum tetap di tahun 2024, serta melakukan persuasi dan tindakan penagihan aktif terhadap STP PBB yang mempunyai nilai yang cukup signifikan.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dan kendala selama tahun 2024 terdapat 4 pelaksana penagihan yaitu:

- 2 (dua) orang JSPN, dimana 1 orang JSPN senior dan 1 orang JSPN baru
- 2 (dua) orang pelaksana Seksi Penagihan, dimana 1 orang merangkap sebagai petugas pemeriksa pajak.

Secara umum, sumber daya JSPN telah cukup untuk melakukan tugas penagihan di KPP Madiun, terlebih salah satu JSPN merupakan JSPN Senior dengan beberapa prestasi pada tingkat Kantor Wilayah. Sedangkan untuk pelaksana penagihan, berdasarkan Analisis Beban Kerja masih terdapat kekurangan.

Rencana aksi Tahun 2025:

Pencapaian target tahun 2025 akan lebih menantang dibanding tahun 2024 karena dengan berlakunya Coretax, terdapat potensi penerimaan penagihan yang hilang dari WP cabang terutama Perhutani yang pada tahun 2024 yang memiliki kontribusi cukup besar dalam penerimaan PKM Penagihan. Rencana aksi penagihan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Melakukan penyegaran berupa rotasi tugas pegawai di Seksi P3 agar seluruh pelaksana P3 mendapatkan pemahaman yang cukup mengenai seluruh tugas dan fungsi Seksi P3;
- Menyusun DSPC dengan mempertimbangkan kemampuan bayar WP serta mengutamakan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap
- Mengutamakan tindakan penagihan aktif kepada keputusan yang diterbitkan 2-3 tahun ke belakang dengan mempertimbangkan kondisi WP.
- Tetap melakukan persuasi dan tindakan penagihan aktif terhadap WP dalam DSPC maupun di luar DSPC.

14. PERSENTASE PENYAMPAIAN USUL PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Berikut merupakan perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya, upaya *extra effort* yang dilakukan, analisis keberhasilan dan penunjang keberhasilan capaian kinerja, kendala, analisis efisiensi sumber daya, dan rencana aksi untuk persentase penyampaian usul bukti permulaan:

KPP Pratama Madiun	Penegakan hukum yang efektif						
	Persentase Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan						
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	N/A	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	N/A	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	120,00%	120,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Aplikasi MandorDJP Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024

Nama IKU	2022	2023
Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	113,10	
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan		100

Perbandingan capaian kinerja IKU terkait pada 2 tahun terakhir

Deskripsi IKU : Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan *Case Building* terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diitndaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Formula IKU :

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

Dalam tahun 2024, KPP Pratama Madiun berhasil mencapai 1 usulan pemeriksaan yang disetujui Kanwil DJP Jawa Timur II pada bulan September 2024, sehingga capaian IKU tersebut adalah 100%. Namun KPP Pratama Madiun melalui rapat Dialog Kinerja dan Organisasi Triwulan IV 2024 yang dilakukan pada 15 Januari 2025 akan menentukan strategi capaian usulan bukti permulaan agar dapat lebih optimal, sehingga diharapkan jika ada 2 usulan pemeriksaan bukti permulaan yang disetujui, angka IKU tersebut dapat optimal yakni di 120%.

Terkait ketercapaian IKU tersebut, *extra effort* yang telah dilakukan KPP Pratama Madiun antara lain : melakukan koordinasi antar seksi dengan baik;

Pembuatan LHPT dan KKPt secara komprehensif; pemanfaatan data eksternal dan

internal (salah satunya data pemicu dan penguji); *advisory visit*, konseling, dan wawancara; Sinergi Pengawasan dengan Fungsional Pemeriksa. KPP Pratama Madiun juga akan melaksanakan *extra effort* tersebut sebagai rencana aksi di Tahun 2025.

15. PERSENTASE PENYELESAIAN LAPORAN PENGAMATAN DAN PENYEDIAAN DATA POTENSI PERPAJAKAN

Berikut adalah perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya, upaya *extra effort*, analisis keberhasilan dan penunjang keberhasilan capaian kinerja, kendala, analisis efisiensi sumber daya, dan rencana aksi untuk Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan:

KPP Pratama Madiun	Data dan Informasi yang berkualitas						
	Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan						
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	N/A	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	N/A	92,80%	92,80%	87,50%	87,50%	120,00%	120,00%
Capaian	N/A	120,00%	120,00%	109,38%	109,38%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi MandorDJP Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024

Nama IKU	2022	2023	2024
Persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan	120		
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan		120	120

Perbandingan capaian kinerja IKU terkait pada 3 tahun terakhir

Deskripsi IKU : Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

(Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan)

Formula IKU : $\frac{+ (Persentase\ penyediaan\ data\ potensi\ perpajakan)}{2} \times 100\%$

Realisasi KPP Pratama Madiun berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, baik dari sisi penyelesaian laporan pengamatan maupun penyediaan data potensi perpajakan.

Berikut adalah perhitungan beberapa Variabel Kontrak Kinerja Persentase Penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan terdiri atas Realisasi Penyelesaian laporan kegiatan pengamatan dikali dengan jangka waktu penyelesaian dibandingkan dengan target penyelesaian laporan kegiatan pengamatan.

Data Objek	NPWP	Non NPWP	Total Selesai	Target	Realisasi IKU	Trajectory	Capaian IKU
913	686	208	894	720	122.50%	100%	120.00%

Extra Effort yang telah dilaksanakan

- Memantau penyampaian laporan pengamatan untuk disusun sesuai dengan format yang ditentukan dan dikirim tepat waktu.
- Menyampaikan laporan pengamatan lebih dari target yang ditentukan yaitu sebanyak 6 laporan pengamatan.
- Menyelesaikan laporan kegiatan pengamatan diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan sejak tanggal surat perintah kegiatan pengamatan yang diterbitkan ke KPP.

Keberhasilan tercapainya IKU tersebut secara optimal, yakni 120% adalah salah satu Seksi Penjaminan Kualitas Data senantiasa bekerjasama dengan Seksi Pengawasan agar laporan pengamatan sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku dan disampaikan tepat waktu.

Terkait efisiensi penggunaan sumber daya, selama tahun 2024 seksi Penjamin Kualitas data terdiri atas 2 administrator sistem dan 2 Pelaksana yang bertugas untuk menghimpun data dari seksi pengawasan, menyusun laporan pengamatan sesuai dengan format dan ketentuan yang berlaku di SE-18/PJ/2019 dan menyampaikan ke Kantor Wilayah tepat waktu.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalah meningkatkan Kerjasama dengan seksi Pengawasan untuk lebih baik dalam penyampaian laporan pengamatan baik dari segi materi maupun waktu.

Selain itu, untuk mendukung aplikasi baru dari DJP dan mengoptimalkan realisasi IKU tersebut, dilakukan visit dan pengumpulan data *offline*, *online*, maupun dari pihak ketiga; merekam pada aplikasi Alket SIDJPNINE; serta memanfaatkan aplikasi MATOA sebagai salah satu alat pengumpulan data di lapangan.

16. PERSENTASE PENGHIMPUNAN DATA REGIONAL DARI ILAP

Berikut adalah perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya, upaya *extra effort*, analisis keberhasilan dan penunjang keberhasilan capaian kinerja, kendala, analisis efisiensi sumber daya, dan rencana aksi untuk Persentase Penghimpunan data regional dari ILAP:

KPP Pratama Madiun	Data dan Informasi yang berkualitas						
	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP						
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%
Realisasi	43,60%	43,60%	43,60%	74,20%	74,20%	74,20%	74,20%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi MandorDJP Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024

Perbandingan Capaian IKU dengan tahun sebelumnya	2023	2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	120	120

Deskripsi IKU : IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP. Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya, dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah serta bentuk kerja sama lainnya. Periode tertentu tersebut adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk tahun 2024 adalah data dengan periode data tahun 2023.

Perhitungan beberapa Variabel Kontrak Kinerja Persentase penghimpunan data regional dari ILAP. Kontrak Kinerja menetapkan bahwa target Persentase penghimpunan data regional dari ILAP 55%, KPP Pratama Madiun telah berhasil mencapai angka realisasi sebesar 74.2%, sehingga Indeks capaian sebesar 120%

Upaya *extra effort* : Menjalin hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah sebagai penyedia data, dan Kantor Wilayah sebagai pemantau penghimpunan data ILAP.

Analisis keberhasilan IKU : dukungan dari Pemerintah Daerah sebagai penyedia data dan kemudahan dalam proses *upload*.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya : sebagai pengampu ILAP, Seksi Penjamin Kualitas Data yang terdiri dari 2 administrator sistem dan 2 Pelaksana menjalin koordinasi dengan KP2KP Caruban dan Pemerintah Daerah.

Rencana aksi ke depan 2025 : lebih meningkatkan komunikasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka koordinasi kepada Pemerintah Daerah Kota/ Kabupaten Madiun untuk konfirmasi ketersediaan data.

17. PERSENTASE TINGKAT KUALITAS KOMPETENSI DAN PELAKSANAAN KEBINTALAN SDM

Berikut adalah perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya, upaya *extra effort*, analisis keberhasilan dan penunjang keberhasilan capaian kinerja, kendala, analisis efisiensi sumber daya, dan rencana aksi untuk Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM. Sebagai informasi bahwa IKU ini merupakan IKU baru yang ada di tahun 2024 sehingga capaian nya tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelum-sebelumnya :

KPP Pratama Madiun	SDM yang kompeten						
	tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM						
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Realisasi	107,22%	111,50%	111,50%	111,50%	111,50%	117,14%	117,14%
Capaian	107,22%	111,50%	111,50%	111,50%	111,50%	117,14%	117,14%

Sumber : Aplikasi MandorDJP Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024

Deskripsi IKU :

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;
- 2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;
- 3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

Formula IKU :

$(\text{Capaian Komponen 1} \times 50\%) + (\text{Capaian Komponen 2} \times 50\%)$

KOMPONEN 1: KUALITAS KOMPETENSI (50%)	
Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)	
$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM} \geq 80\%}{\text{Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\% \text{ dan dilakukan pengembangan}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM} \geq 80\%} \times 70\%$	
Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)	
$\frac{\text{Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis}}{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis}} \times 30\% + \frac{\text{Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan}}{\text{jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis}} \times 70\%$	
Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)	
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning Studia x 40%)	
Formula Komponen Kualitas Kompetensi	(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

Analisis keberhasilan, upaya *extra effort* dan efisiensi sumber daya yang telah dilakukan adalah : Tidak optimalnya capaian IKU ini adalah karena terdapat salah satu pegawai yang tidak lulus ujian kompetensi pada tahun 2024, sehingga upaya yang dilakukan selanjutnya adalah pegawai yang tidak lulus ujian kompetensi diikutkan program pengembangan. Di antara program pengembangan yang dilakukan adalah pegawai tersebut (berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Kantor) mengikuti pelatihan *In-House Training* (IHT), sosialisasi, bimbingan teknis, *Open Access* di KLC, dan *website* studiA, yang mana Kepala Subbag Umum dan Kepatuhan Internal dan atasan langsungnya sebagai mentor dan pemantau efektivitas pelaksanaan program pengembangan. Setiap bulan dilakukan pencatatan kemajuan pelaksanaan program pengembangan yang telah dilaksanakan. Strategi selanjutnya adalah Pelaksanaan Kebintalan SDM dilakukan sinkronisasi dengan pelaksanaan *Internalisasi Corporate Value* (ICV) dan kegiatan lainnya yang sudah rutin dilaksanakan sebelumnya serta tertib dalam dokumentasi dan pelaporan.

Rencana aksi 2025 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal dan atasan langsungnya membuat perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan penugasan kepada pegawai tersebut mengikuti program Pengembangan, dan setiap bulan dilakukan pemantauan kemajuan pelaksanaan program;
2. Penyusunan Sinkronisasi Rencana Kebintalan dan program ICV;
3. Tertib Dokumentasi dan Pelaporan.

18. INDEKS PENILAIAN INTEGRITAS UNIT

Berikut adalah perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya, upaya *extra effort*, analisis keberhasilan dan penunjang keberhasilan capaian kinerja, kendala, analisis efisiensi sumber daya, dan rencana aksi untuk Indeks Penilaian Integritas Unit :

Formula Komponen 2 : Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	Triwulan I s.d. III: (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai kepatuhan pelaporan)						
	Triwulan IV: (60% x pelaksanaan kegiatan) + (30% feedback peserta) + (10% x nilai kepatuhan pelaporan)						
	Target Triwulan I s.d. III: Pelaksanaan Kegiatan + Kepatuhan Pelaporan						
	Target Triwulan IV: Pelaksanaan Kegiatan + Feedback Peserta + Kepatuhan Pelaporan						
KPP Pratama Madiun	Organisasi yang berkinerja tinggi						
	Indeks Penilaian Integritas Unit						
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	N/A		0,00%		0,00%	85,00%	85,00%
Realisasi	N/A		0,00%		0,00%	92,54%	92,54%
Capaian	0,00%		0,00%		0,00%	108,87%	108,87%

Sumber : Aplikasi MandorDJP Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024

	2022	2023	2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	109,58	111,79	110,74

Perbandingan capaian kinerja IKU terkait pada 3 tahun terakhir

Deskripsi IKU : Indeks Penilaian Integritas Unit diperoleh dengan cara melakukan survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak) yang mencakup empat proses bisnis sebagai berikut:

- a. Pelayanan perpajakan
- b. Pengawasan perpajakan
- c. Pemeriksaan perpajakan
- d. Penagihan pajak

Survei tersebut dilakukan secara proporsional setelah responden selesai menerima layanan masing-masing probis berdasarkan *longlist* responden yang telah diusulkan KPP Pratama Madiun. Indeks hasil survei tersebut dikurangi dengan faktor koreksi seperti:

- a. Operasi tangkap tangan (OTT) oleh aparat penegak hukum (APH)
- b. Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti *fraud*
- c. Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit
- d. Informasi terjadinya *fraud* yang diberikan oleh APH

Formula IKU : $((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

Analisis Keberhasilan, upaya *extra effort* dan efisiensi sumber daya yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

- menjaga integritas sesuai ketentuan;
- mengadakan sosialisasi peningkatan nilai integritas pada pegawai; meningkatkan efektivitas fungsi Unit Kepatuhan Internal (UKI);
- melaksanakan IHT Anti Gratifikasi dan Sosialisasi Anti Korupsi baik internal maupun eksternal;
- senantiasa melakukan pemutaran video *Public Campaign* anti gratifikasi setiap kegiatan internal maupun eksternal.

Rencana aksi tahun 2025:

Mengimbuai responden untuk melakukan pengisian survei, mengumpulkan *longlist* responden SPIU sebelum batas waktu yang ditentukan oleh KITSDA; Menjaga integritas sesuai ketentuan; Mengadakan sosialisasi peningkatan nilai integritas pada pegawai; meningkatkan efektivitas fungsi Unit Kepatuhan Internal (UKI), serta Sosialisasi Anti Gratifikasi dan Anti Korupsi pada tahun 2025; Seksi terkait melakukan validasi surat elektronik calon responden.

19. INDEKS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA DAN MANAJEMEN RISIKO

Berikut adalah perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya, upaya *extra effort*, analisis keberhasilan dan penunjang keberhasilan capaian kinerja, kendala, analisis efisiensi sumber daya, dan rencana aksi untuk Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko:

KPP Pratama Madiun	Organisasi yang berkinerja tinggi						
	Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Penerapan Manajemen Risiko						
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	23,00%	47,00%	47,00%	70,00%	70,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	75,28%	61,91%	61,91%	74,53%	74,53%	99,66%	99,66%
Capaian	120,00%	120,00%	120,00%	106,47%	106,47%	110,73%	110,73%

Sumber : Aplikasi MandorDJP Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024

Nama IKU	2022	2023	2024
Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko			110,74
Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	111,11		
Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko		111,11	

Perbandingan capaian kinerja IKU terkait pada 3 tahun terakhir

Deskripsi IKU: Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif. Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- b. Pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini.

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi. Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu. Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan. Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Formula IKU :

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko
= Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

Berdasarkan Laporan DKRO tahun 2024, realisasi persentase efektivitas dialog kinerja organisasi dan penerapan manajemen risiko telah melebihi target yang ditetapkan sebagaimana tersaji pada tabel di atas.

Upaya *extra effort* dan efisiensi sumber daya yang telah dilaksanakan dalam rangka mencapai capaian IKU yang optimal antara lain :

1. Kepala Kantor dan Kepala Subbag Umum dan Kepatuhan Internal telah melaksanakan "Imbauan terkait Manajemen Kinerja" kepada seluruh pegawai pada saat *Morning Activity* (program ICV-Motivasi Bulanan), setiap sebelum tanggal 15 akhir bulan periode triwulan. Untuk tiap triwulan pada tahun 2024 telah dilaksanakan dan dilaporkan ke Kanwil

DJP Jawa Timur II sebelum tenggat waktu.

2. Sedangkan Rapat DKRO telah dibuat Undangan/Nota Dinas sekaligus dengan pelaksanaan program ICV-Motivasi Triwulanan, dilaksanakan dan laporan dikirim ke Kanwil sebelum tenggat waktu yakni sebelum tanggal 20 setelah triwulan berakhir.
3. Tertib dokumentasi dan pelaporan.

Rencana aksi 2025 yang perlu dilakukan antara lain :

1. Melaksanakan Imbauan terkait Manajemen Kinerja setidaknya sekali setiap triwulan sebelum tanggal 15 Desember untuk tiap periode
2. Setiap Seksi/Kelompok sebagai penanggungjawab IKU sudah membuat penjelasan progres capaian IKU sebelum pelaksanaan DKRO,
3. Melaksanakan DKRO pada tanggal 15 setelah triwulan berakhir karena data di MandorDJP untuk Dashboard Kinerja Organisasi baru valid pada tanggal 15 setelah triwulan berakhir,
4. Rapat koordinasi dengan seksi terkait untuk melakukan pengawasan terhadap Rencana Aksi Penanganan Risiko yang selesai dijalankan dan melakukan pengawasan secara berkala untuk realisasi mitigasi risiko sesuai Formulir Pemantauan Mitigasi Risiko tiap triwulan nya,
5. Pegawai Pemilik IKU bertanggung jawab atas keakuratan data isian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dibuat,
6. Atasan langsung melakukan validasi atas isian SKP yang dibuat bawahannya.

20. INDEKS KINERJA KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN

Berikut adalah perbandingan target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini, perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya, upaya *extra effort*, analisis keberhasilan dan penunjang keberhasilan capaian kinerja, kendala, analisis efisiensi sumber daya, analisis dukungan IKU terhadap kebijakan pemerintah (efisiensi anggaran), dan rencana aksi untuk Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran :

KPP Pratama Madiun	Penguatan pengelolaan keuangan yang Optimal						
	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran						
T/R	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	104,7	105,26%	105,26%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	104,70%	105,26%	105,26%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber : Aplikasi MandorDJP Dashboard Kinerja Organisasi Tahun 2024

Nama IKU	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	100	103,88	96,75	97,88	
Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran					120

Perbandingan capaian kinerja IKU 5 tahun terakhir. Capaian IKU terkait pada Tahun 2024 adalah yang tertinggi selama 5 Tahun terakhir.

Deskripsi IKU : Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran

(DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 Tahun 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Formula IKU :

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA $\geq 95,00$
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMART DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

Ruang lingkup perhitungan mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tanggal 18 Maret 2022.

Berdasarkan aplikasi OM-SPAN dan SMART, berikut adalah persentase kinerja kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2024:

Unsur penilaian	Q1	Q2	Q3	Q4
OM-SPAN (IKPA)	99,99%	100%	100%	100%
SMART	-	-	-	99,23%
Total realisasi	99,99%	100%	100%	100%

Sama seperti tahun sebelum-sebelumnya, nilai penyerapan anggaran tahun 2024 berada di atas 95,5%. Pada Q4 Tahun 2024, nilai IKPA KPP Pratama Madiun melesat lebih tinggi jika dibandingkan IKPA Q4 2023 yang berada di angka 98,40%. Total Realisasi Indeks Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 juga berada pada angka maksimal yakni 100 sehingga capaian IKU IKPA 2024 adalah 120%. Angka SMART pada Tahun 2024 juga naik pesat dibanding Tahun 2023 yang hanya di angka 89,32%. Pada Tahun 2023 realisasi indeks tersebut berada di bawah 95,5% karena terdapat faktor efisiensi anggaran yang turut dihitung pada triwulan IV membuat realisasi IKU pada triwulan IV menjadi 92,95%.

Hasil yang sangat optimal ini tidak terlepas dari upaya *extra effort* yang telah dilakukan oleh Bendahara dan Tim Keuangan KPP Pratama Madiun, yakni :

1. Melakukan kegiatan rapat anggaran untuk menunjang kegiatan pelaksanaan anggaran yang optimal;
2. Melakukan kegiatan revisi anggaran dan penyesuaian rencana terkait optimalisasi belanja dan efisiensi;
3. Melakukan perencanaan pencairan dana yang lebih optimal dan efisien;
4. Melakukan revisi anggaran untuk penyesuaian akun dan optimalisasi pelaksanaan anggaran TA 2024;
5. Menjaga akurasi RPD dengan deviasi di bawah 5%.

Namun terkadang terdapat kendala berupa terlambatnya rekanan dalam menyampaikan tagihan sehingga dapat mempengaruhi realisasi dari RPD Bulanan yang telah dibuat. Sedangkan efisiensi anggaran dan sumber daya yang telah dilakukan dalam IKU ini adalah efisiensi Surat Perjalanan Dinas.

Rencana aksi yang perlu dilakukan di 2025 adalah melanjutkan dan mempertahankan prestasi capaian IKPA 2024, yang juga mengantarkan KPP Pratama Madiun mendapat anugerah capaian IKPA Terbaik di Kanwil DJP Jawa Timur II, yakni :

1. Memantau capaian penyerapan anggaran setiap bulan sehingga dapat terkontrol dan sesuai RPD serta senantiasa memegang prinsip efisiensi dalam merealisasikan kebutuhan belanja, serta memantau capaian IKU baik dari unsur penyerapan maupun efisiensi;
2. Melakukan indentifikasi belanja yang diperlukan sesuai dengan prioritas, terlebih dengan adanya kebijakan Efisiensi Anggaran dari Pemerintah Tahun 2025;
3. Memastikan pencairan belanja pegawai dan barang dapat berjalan dengan baik dan lancar.
4. Menjaga akurasi RPD dengan deviasi di bawah 5%.
5. Rapat Tim Keuangan secara rutin

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI KP2KP CARUBAN

Secara umum, kinerja organisasi KP2KP telah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai penjelasan, berikut akan disajikan realisasi kinerja KP2KP Caruban untuk setiap IKU.

PERSENTASE CAPAIAN TINGKAT KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK BADAN DAN ORANG PRIBADI

Uraian realisasi sama dengan Capaian Kinerja Organisasi KPP Pratama Madiun.

PERSENTASE PERUBAHAN PERILAKU LAPOR DAN BAYAR ATAS KEGIATAN EDUKASI DAN PENYULUHAN

- Berdasarkan aplikasi Mandor DJP, realisasi persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan KP2KP Caruban sama dengan realisasi persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan KPP Pratama Madiun, yaitu mencapai 88,80%, baik untuk periode semester I maupun semester II. Angka ini tumbuh sebesar 4.80 % dibandingkan tahun sebelumnya yaitu diangka 84%.
- Selain itu arah kegiatan edukasi dan penyuluhan lebih menekankan pada pencapaian kualitas dibandingkan kuantitas. Selain ditandai dengan penurunan proporsi jenis Sub IKU yang sebelumnya (2023) diangka 21% menjadi 18,50% (2024), penekanan sisi kualitas juga ditunjukkan dengan adanya capaian penerimaan pada sub IKU Perubahan Perilaku Bayar pada Tahun 2024 Sebesar Rp230.430.844,-.

Adapun perhitungan capaian kinerja tersebut jika di-*breakdown* untuk setiap Sub IKU adalah sebagai berikut:

Jenis Sub IKU	Realisasi	Proporsi
Kegiatan	100,00%	18,50%
Perubahan Perilaku Bayar	1103,85%	42,18%
Perubahan Perilaku Lapor	111,54%	28,12%
	Total	88,80%

Selama tahun 2024, aplikasi Mandor DJP mencatat ada 9 kegiatan edukasi dan penyuluhan yang dilaksanakan oleh tim penyuluh, diantaranya Pajak Bertutur, *Tax Goes to School*, penyuluhan *one on one*, dan sosialisasi bendahara.

- Tantangan penyuluhan yang juga menekankan pada aspek kualitas, tidak dibarengi dengan keleluasaan dalam input pelaporan kegiatan administrasi. Pengakuan perubahan perilaku dalam laporan kegiatan, maksimal adalah dihari yang sama ketika Wajib Pajak diberikan edukasi. Sehingga operator yang merangkap sebagai petugas lapangan harus melakukan *extra effort* dalam melakukan input pelaporan kegiatan.
- Masalah SDM selalu menjadi *highlight* dan tantangan utama dalam proses pelaksanaan kegiatan di KP2KP Caruban. KP2KP Caruban terdiri 5 orang pegawai dengan rincian 1 Kepala Kantor dan 4 orang pelaksana. Wilayah yang diampu KP2KP Caruban sebagai kepanjangan tangan pelayanan KPP Pratama Madiun khususnya di wilayah Kabupaten Madiun, terlampau sangat luas dengan kondisi SDM yang ada. Luas wilayah Kabupaten

Madiun sebesar 1.010,86 km² atau 101.086 Ha, terbagi kedalam 15 Kecamatan, 8 Kelurahan, dan 198 Desa.

- Kondisi sosio-demografis masyarakat yang beragam dengan latar belakang yang bermacam-macam seringkali menimbulkan resistensi terhadap pajak.
Sehingga diperlukan pendekatan-pendekatan persuasif dan humanis untuk menyentuh pemahaman Wajib Pajak tertentu. Ditambah dengan proses pelayanan pajak yang semakin modern dengan pemanfaatan teknologi, membuat tantangan edukasi kedepan juga semakin kompleks.
- Kurangnya literasi, resistensi terhadap teknologi, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak dalam pembangunan masih menjadi masalah yang seringkali dihadapi dilapangan.
- Adanya kendala terkait sinergi dengan para *stakeholder*, khususnya Pemerintah Daerah sebagai Pembina Utama Masyarakat.
- Rencana Aksi 2025 :
 1. Melakukan Layanan di Luar Kantor (LDK) pada masing-masing Kecamatan untuk menjangkau semua lapisan masyarakat di kabupaten Madiun secara efisien dengan mempertimbangkan personil dan sumber daya yang ada.
 2. Membangun sinergi yang baik dengan para stake holder maupun pemerintah daerah selaku pembina utama masyarakat daerah, untuk lebih menjangkau dan menggaungkan kepatuhan kepada masyarakat.
 3. Mengadakan acara penghargaan atau apresiasi kepada masyarakat maupun instansi yang taat pajak, misalnya seperti Desa Patuh. Hal ini bermanfaat untuk memberikan perspektif dan pendekatan yang berbeda kepada masyarakat mengenai pajak.
 4. Melakukan taat administrasi, dan menentukan skala prioritas khususnya dalam melakukan pelaporan edukasi perpajakan dalam aplikasi Sisuluh (Coretax)

PERSENTASE PENYELESAIAN PERMOHONAN MELALUI APLIKASI E-REGISTRATION TEPAT WAKTU

Berdasarkan administrasi KP2KP Caruban, realisasi persentase penyelesaian permohonan melalui aplikasi *e-registration* tepat waktu telah sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu 100% untuk setiap triwulan.

Capaian sempurna ini bisa terlaksana, karena baik KP2KP Caruban dan KPP Pratama Madiun salah satunya memiliki layanan unggulan misalnya pendaftaran NPWP hanya 1 hari kerja, Aktivasi EFIN 1 hari kerja, konfirmasi status Wajib Pajak 1 hari dsb. Tertib administrasi juga menjadi kunci dalam keberhasilan mengamankan penyelesaian permohonan melalui aplikasi *E-Registration* tepat waktu. Ketika terjadi permasalahan jaringan, maka yang harus dilakukan petugas dilapangan adalah memastikan situasi dan kondisi di ruang pelayanan tetap kondusif, dengan melakukan komunikasi dan persuasi yang baik kepada Wajib Pajak atas kendala yang dialami. Selanjutnya yang harus dilakukan adalah dengan melakukan eskalasi permasalahan pada saluran-saluran yang ditentukan misalnya dengan Aplikasi Lasis / Melati ataupun jaringan komunikasi lainnya.

Tantangan tahun 2025 menjadi semakin kompleks dengan adanya implementasi aplikasi Coretax. Awal dari suatu pembaruan selalu menjadi titik krusial dalam langkah perubahan yang masif. Semangat ini yang ha

kita kawal terus, sampai aplikasi ini berjalan semakin baik. Tantangan petugas lapangan yang berjibaku dengan kendala jaringan adalah tetap menjaga kondusivitas pelayanan kepada Wajib Pajak. Selain itu pemahaman dan pelatihan-pelatihan aplikasi Coretax kepada para petugas/pegawai perlu untuk selalu dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kemampuan petugas di lapangan.

PERSENTASE PENYEDIAAN DATA POTENSI PERPAJAKAN

Realisasi IKU persentase penyediaan data potensi perpajakan KP2KP Caruban sudah termasuk dalam perhitungan IKU persentase penyediaan data potensi perpajakan KPP Pratama Madiun. Berdasarkan aplikasi Mandor DJP, berikut adalah jumlah KPDL yang telah ditindaklanjuti tepat waktu oleh KP2KP Caruban Tahun 2024 :

	Q1	Q2	Q3	Q4
Jumlah KPDL	9	24	39	53

Peningkatan data dan potensi perpajakan yang ada di Kabupaten Madiun mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif yang ada di Kab. Madiun. Pembangunan daerah industri, pabrik-pabrik, manufaktur dll yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Madiun membuka peluang lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Beberapa wilayah industri di Kabupaten Madiun diantaranya seperti di Kecamatan Pilangkenceng (Pabrik Global Way Indonesia, Pabrik Maklon sepatu, industri kayu dll), Di Kecamatan Balerejo (Pabrik Pakan Japfa, Sosis dll), Pabrik Porang di Kecamatan Wungu, Gudang DC Alfamart di Kecamatan Saradan dll. Banyaknya lapangan pekerjaan akan meningkatkan roda perekonomian masyarakat.

Rencana aksi KPDL :

- Pemanfaatan media sosial dalam penggalan data dan potensi perpajakan yang baru
- Bekerja sama dengan instansi maupun stake holder terkait (misalnya dinas perizinan dll) untuk menggali informasi data potensi perpajakan yang baru
- Melakukan pengamatan secara langsung

PERSENTASE PENGIRIMAN SPT KE KPP TEPAT WAKTU

Berdasarkan administrasi KP2KP Caruban, realisasi persentase pengiriman SPT ke KPP tepat waktu telah sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu 100% untuk setiap triwulan.

C. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan aplikasi OM-SPAN dan SPANINT, KPP Pratama Madiun berhasil merealisasikan 99,24% anggarannya pada tahun 2024. Adapun rincian realisasi untuk tiap triwulan tersaji pada tabel di bawah ini:

	Q1	Q2	Q3	Q4
Realisasi (Rp)	1.413.418.019	1.910.727.710	1.467.714.326	2.155.383.032
Total Realisasi (Rp)	1.413.418.019	3.324.145.729	4.791.860.055	6.947.243.087
Total Realisasi (%)	20,19%	47,48%	68,45%	99,24%

Realisasi anggaran tahun 2024 tersebut mengalami kenaikan pesat bila dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023 pada angka 97,3%. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat efisiensi anggaran dan tingkat penyerapan anggaran yang optimal, serta perencanaan keuangan yang matang, antara lain dengan diadakannya Rapat Tim Keuangan Internal KPP Pratama Madiun secara periodik.

D. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisiensi pada bidang anggaran dan sumber daya organisasi yang telah dilaksanakan KPP Pratama Madiun selama Tahun 2024 adalah efisiensi dalam hal biaya perjalanan dinas sesuai Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun Nomor KEP-93/KPP.2406/2024 tanggal 10 September 2024 Tentang Perubahan KEP-11/KPP.2406/2024 Tentang Penetapan Besaran Maksimal Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan KPP Pratama Madiun Dan KP2KP Caruban yang mulai dilaksanakan pada mulai Oktober 2024.

E. KINERJA LAIN-LAIN

1. PENGHARGAAN



Penghargaan Juara Ketiga Lomba Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kanwil DJP Jawa Timur II Tahun 2024



Penghargaan a.n. Imam Kuswanto sebagai manager terbaik II tingkat KPP Pratama se-Jawa Timur. Diperoleh dari Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jawa Timur



Penghargaan Satuan Kerja dengan Kinerja Fungsi Pengawasan Terbaik Pertama Tingkat Kanwil DJP Jawa Timur II Tahun 2024



Penghargaan Satuan kerja dengan Capaian PKM Penagihan Terbaik Pertama Tingkat Kanwil DJP Jawa Timur II Tahun 2024



Penghargaan Satuan Kerja dengan Rating Google Review Tertinggi Pertama Tingkat Kanwil DJP Jawa Timur II Tahun 2024



Penghargaan Satuan Kerja dengan Capaian IKU IKA Terbaik Pertama Tingkat Kanwil DJP Jawa Timur II Tahun 2024

Penghargaan Satuan Kerja dengan Nilai Inovasi Tertinggi Pertama Tingkat Kanwil DJP Jawa Timur II Tahun 2024

Penghargaan dari KPPN Tipe A1 Madiun atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Teraktif Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

Penghargaan Satuan Kerja dengan Pengelolaan Ruang Server Terbaik Pertama Tingkat Kanwil DJP Jawa Timur II Tahun 2024

2. INOVASI

a. Inovasi Desa Patuh

Desa Patuh merupakan program apresiasi kepada Pemerintah Desa yang telah berkontribusi melalui pajak. Desa patuh memiliki tiga kategori yaitu kepatuhan SPT Tahunan, pembayaran pajak PBB, dan pajak kendaraan bermotor. Program apresiasi ini merupakan bentuk kolaborasi KPP Pratama Madiun dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan adanya program Desa Patuh ini, KPP Pratama Madiun berharap pemerintah desa dapat secara antusias mengajak Wajib Pajak di desa setempat untuk melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu.



- b. **Inovasi Abimanyu (Ahli Bijak Mahasiswa Penyuluh) / Pembinaan Tax Center** merupakan perluasan program kerjasama *Tax Center*. Abimanyu fokus pada pengembangan diri mahasiswa sebagai kader pajak dengan tujuan mahasiswa paham dan ahli, ikut menyebarkan pajak serta membantu masyarakat dalam perpajakan.



- c. **Inovasi Pojok PDI**

Aplikasi yang memuat berbagai fitur untuk menunjang kinerja pegawai KPP Pratama Madiun



d. Inovasi Pecel.in



e. Inovasi Sambang Desa

Kegiatan Layanan di Luar Kantor (LDK) yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan dengan cara mengunjungi lokasi yang mudah diakses dan dijangkau.



F. EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Tahun 2024 KPP Pratama Madiun tidak turut serta dalam Penilaian Predikat Zona Integritas WBK/WBBM karena telah meraih predikat ZI WBK pada Tahun 2020, sehingga, pada Tahun 2024 KPP Pratama Madiun bukan termasuk unit kerja yang dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan. Pada Tahun 2024 KPP Pratama Madiun menjadi salah satu unit kerja yang dilakukan Monitoring dan Evaluasi Keberlanjutan ZI WBK oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, dengan hasil bahwa

KPP Pratama Madiun dinyatakan memenuhi syarat sebagai salah satu unit dengan Keberlanjutan ZI WBK.

Sebagai tambahan informasi, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

BAB IV

PENUTUP

Secara keseluruhan, Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Madiun tahun 2024 mengalami peningkatan pesat bila dibandingkan dengan Nilai Kinerja Organisasi tahun 2023 namun tidak lebih tinggi dari capaian Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2022. Namun secara keseluruhan, pada tahun 2024 KPP Pratama Madiun berhasil mencapai target yakni lebih dari 100% untuk seluruh 20 Indikator Kinerja Utama pada Nilai Kinerja Organisasi, sedangkan pada Tahun 2022 dan 2023 terdapat IKU yang tidak mencapai target.

Pada tahun 2025, KPP Pratama Madiun akan semakin mengupayakan peningkatan dan perbaikan kinerjanya melalui beberapa rencana aksi, di antaranya:

1. Penyusunan rencana kerja tahunan dan manajemen risiko yang mencerminkan Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Madiun;
2. Pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi dan Review Implementasi Manajemen Risiko yang efektif;
3. Percepatan pemenuhan IKU kepatuhan di Semester I 2025 dengan pelaksanaan berbagai program seperti Program Desa Patuh, Layanan di Luar Kantor (LDK), dan berbagai program lainnya sehingga Semester II dapat berfokus pada pemenuhan IKU penerimaan;
4. Peningkatan kualitas data perpajakan, agar kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien;
5. Peningkatan kualitas penyuluhan dan pelayanan dalam rangka meningkatkan kesadaran Wajib Pajak akan hak dan kewajiban perpajakannya;
6. Peningkatan standar kompetensi pegawai dengan mendorong pegawai untuk senantiasa meningkatkan kompetensinya melalui sarana yang telah disediakan, seperti keikutsertaan pada studiA, KLC, maupun media peningkatan kompetensi lain yang disediakan oleh Tim Peningkatan Kompetensi;
7. Penerapan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-5/PJ/2023, sehingga kegiatan pemeriksaan dapat berfokus pada pemenuhan komponen PKM;
8. Pengawasan atas kualitas pelaksanaan anggaran sehingga tingkat penyerapan dan efisiensi anggaran dapat dipertahankan;
9. Memastikan integritas pegawai tetap terjaga dalam setiap pelaksanaan tugasnya, diantaranya dengan internalisasi kode etik, Nilai-Nilai ASN, dan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan.



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Laporan : LAPORAN KINERJA TAHUN 2024 KPP PRATAMA
MADIUN DAN KP2KP CARUBAN
Nomor Laporan : LAP-5/KPP.2406/2025
Tanggal Laporan : 30 Januari 2025

Mengetahui,
Kepala KPP Pratama Madiun

Kepala Subbagian Umum
dan Kepatuhan Internal



Ditandatangani secara elektronik
Rizaldi



Ditandatangani secara elektronik
Styono



DAFTAR LAMPIRAN

1. Rekapitulasi Penerimaan KPP Pratama Madiun berdasarkan MPN Info

REKAPITULASI PENERIMAAN KPP PRATAMA MADIUN BERDASARKAN MPN INFO

Sektor	Nama	2022	Peranan 2022	2023	Peranan 2023	2024	Peranan 2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.672.176.205	2,23%	4.620.295.937	0,84%	14.301.710.599	2,04%
B	Pertambangan dan Penggalian	16.232.793	0,00%	11.125.173	0,00%	18.223.934	0,00%
C	Industri Pengolahan	25.682.600.461	4,19%	46.209.585.694	8,39%	60.722.529.585	8,66%
D	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	14.693.573.473	2,40%	18.496.700.991	3,36%	32.848.211.843	4,68%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang, Pembuangan dan Pembersihan Limbah dan Sampah	384.454.218	0,06%	663.933.567	0,12%	893.851.355	0,13%
F	Konstruksi	15.942.138.795	2,60%	13.863.245.518	2,52%	4.923.990.524	0,70%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	136.999.589.723	22,34%	106.034.418.555	19,26%	143.851.897.188	20,51%
H	Transportasi dan Pergudangan	27.051.316.228	4,41%	31.574.787.482	5,73%	46.039.650.880	6,56%
I	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	4.303.633.739	0,70%	2.690.252.788	0,49%	3.602.191.892	0,51%
J	Informasi dan Komunikasi	7.540.501.398	1,23%	8.528.598.442	1,55%	10.420.045.488	1,49%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	51.862.430.992	8,46%	62.227.829.462	11,30%	87.518.586.016	12,48%
L	Real Estate	2.812.768.455	0,46%	3.065.279.695	0,56%	3.295.994.388	0,47%
M	Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis	2.478.068.896	0,40%	1.972.919.349	0,36%	4.587.081.728	0,65%
N	Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	873.798.887	0,14%	762.491.404	0,14%	1.102.724.674	0,16%
O	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	211.428.864.070	34,48%	230.331.357.054	41,83%	243.837.187.069	34,76%
P	Jasa Pendidikan	1.044.162.301	0,17%	1.348.894.448	0,24%	1.477.430.766	0,21%

Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.451.401.126	1,05%	4.850.816.648	0,88%	8.025.617.435	1,14%
R	Kebudayaan, Hiburan dan Rekreasi	599.656.812	0,10%	1.227.643.646	0,22%	583.225.657	0,08%
S	Kegiatan Jasa Lainnya	28.737.736.175	4,69%	15.609.574.607	2,84%	13.023.296.044	1,86%
T	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga, Kegiatan yang Menghasilkan Barang dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan Sendiri Untuk Memenuhi Kebutuhan	17.399.383	0,00%	164.072.133	0,03%	22.320.070	0,00%
unknown	Wajib Pajak KLU Error	- 953.589.604	-0,16%	- 17.506.179.689	-3,18%	- 3.535.094.302	-0,50%
Z		61.629.243.473	10,05%	13.823.713.210	2,51%	23.881.220.349	3,40%
TOTAL		613.268.157.999		550.571.356.114		701.441.893.182	